BAB V

KESIMPULAN

Pada bab ini akan ditarik kesimpulan yang diperoleh dari analisa yang dituliskan dari bab-bab sebelumnya sehingga menghasilkan gambaran dari keseluruhan hasil penelitian.

Myanmar merupakan salah satu Negara yang terletak di wilayah Asia Tenggara bersama Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Vietnam, Brunei Darussalam, Laos, Kamboja, Filipina serta Timor Leste. Sebelum memperoleh kemerdekaannya, Negara ini terlebih dulu mengalami masa penjajahan yang cukup panjang. Negara ini sempat dijajah oleh Inggris, Negara ratu Elizabeth itu mulai melakukan penjajahan kepada Myanmar pada tahun 1885. Negara yang mendapatkan kemerdekaannya pada tahun 4 januari 1948 ini juga sempat mengalami masa-masa penjajahan oleh Inggris. Tidak hanya Inggris, namun Jepang ternyata juga pernah melakukan penjajahan atas Myanmar. Awal invasi Jepang atas Negara ini terjadi pada tahun 1941 tepatnya pada bulan Desember yang dibantu oleh *Myanmar Independence Army* yang dipimpin Aung San.

Negara yang terletak di Asia ini juga dikenal sebagai Negara yang kaya akan keberagaman etnisnya. Burma merupakan salah satu dari sekian banyak etnis mayoritas yang menempati Negara tersebut. Namun selain etnis mayoritas, terdapat pula etnis minoritas yang mendiami Negara tersebut. Berbicara mengenai etnis minoritas khususnya yang berada dalam Negara Myanmar, terdapat satu etnis minoritas yang belakangan ini menjadi pusat perhatian global karena konflik yang terjadi di wilayahnya yaitu Rohingya.

Rohingya termasuk kedalam salah satu etnis yang diakui semasa penjajahan Inggris. Selain itu, menilik dari sejarahnya, ternyata etnis Rohingya adalah salah satu etnis pembawa agama Islam untuk masuk ke Negara Myanmar. Akan tetapi, seiring berjalannya waktu dan adanya kekuatan

etnis mayoritas membuat etnis atau kelompok ini kehilangan kekuatannya. Berbagai permasalahan dengan kelompok etnis mayoitas di Myanmar yaitu Burma semakin memperburuk keadaan kawasan serta masyarakat Rohingya sendiri. Kasus yang terjadi di tahun 1700-an akhirnya kembali pecah dan meluas pada tahun 2016.

Dengan adanya konflik ini juga membuka kembali sejarah kelam masyarakat Rohingya terhadap diskriminasi yang dilakukan oleh pihak pemerintah dan etnis Burma terhadap mereka. Selain hal tersebut, timbulnya konflik ini membuat ratusan bahkan ribuan korban yang mayoritas perempuan kembali berjatuhan. Namun, dibalik situasi yang tidak menguntungkan bagi perempuan sebagaimana yang telah dijelaskan penulis diatas, perempuan juga mampu menjadi pelopor terjadinya resolusi konflik khususnya di Myanmar.

Konflik kerap kali terjadi pada setiap Negara baik itu berupa konflik internal maupun konfik gabungan yang melibatkan pihak lain diluar Negara tersebut. Konflik merupakan sebuah benturan atau pertikaian yang melibatkan dua belah pihak atau lebih biasanya terjadi karena adanya perbedaan pendapat serta ingin mempertahankan keinginan masing-masing dengan tujuan tertentu. Selaras dengan konflik, sebuah resolusi pastinya diperlukan untuk menyelesaikan suatu permasalahan antara beberapa pihak. Dalam bab tiga penulis telah dijelaskan bahwa perempuan kerap kali mendapatkan “peran” sebagai korban dari sebuah konflik dan menjadi pihak yang memiliki kerugian lebih besar dari laki-laki. Namun, ternyata didalam perjalanannya perempuan juga mampu menjadi aktor dalam terciptanya resolusi konflik di suatu wilayah. Perempuan mampu menjadi agen perubahan dan perdamaian bagi sebuah konflik seperti yang terjadi di Negara bagian Karen, Myanmar.

Pada kasus ini perempuan mampu mendirikan suatu organisasi bernama *Karen Women’s Organisations* (KWO) yang berperan untuk menyadarkan perempuan agar turut serta

berpartisipasi dalam pengambilan keputusan dan politik. Selain itu, KWO melakukan berbagai kegiatan pemberdayaan bagi perempuan di pengungsian dan edukasi bagi anak-anak serta tentu saja perempuan. Kegiatan yang dilakukan oleh KWO ini merupakan refleksi dari Resolusi Dewan Keamanan 1325 yang dikeluarkan oleh PBB di tahun 2000.

Resolusi tersebut dibuat agar ruang gerak perempuan dalam turut serta mengambil bagian dari perdamaian dan perubahan lebih leluasa dari sebelumnya. Hal ini tentu saja tidak lepas dari peran latarbelakang politik serta pendidikan yang dimiliki perempuan tersebut. Melihat kesuksesan yang dilakukan oleh pihak KWO terhadap perempuan Karen ini membuat penulis memiliki harapan besar kepada tingkat partisipasi dan peran perempuan terhadap konflik Rohingya. Penjelasan terkait dengan peran serta partisipasi perempuan dalam resolusi konflik Rohingya akan dibahas pada bagian selanjutnya dalam skripsi ini.

Melihat pada kasus yang terjadi di Rohingya ini penulis mencoba mengulik bagaimana peran perempuan di dalamnya. Ternyata penulis mendapatkan fakta bahwa dalam kasus ini perempuan memiliki peranan sebagai korban serta agen perubahan. Sebagai korban, perempuan mendapatkan berbagai kekerasan serta tindakan tindakan tidak menyenangkan dari pihak lawan yang menempati wilayah mereka. Alhasil, para perempuan tersebut bersama anak-anak dan para lelaki memutuskan untuk melakukan pengungsian ke beberapa Negara lain, salah satunya Bangladesh. Rata-rata pengungsi yang datang dari Rohingya ini merupakan korban kekerasan dan mencoba untuk menyelamatkan dirinya agar tidak mengalami tindakan yang lebih jauh lagi. Para pengungsi ini menempati beberapa wilayah di Bangladesh serta berbagai Negara lain baik yang terletak di kawasan Asia Tenggara maupun diluar kawasan ASEAN.

Namun, ternyata perempuan juga mampu menjadi seorang agen perubahan bagi suatu konflik. Hal ini dibuktikan

dengan keterlibatan salah satu aktivis Rohingya yang bernama Wai Wai Nu serta salah satu organisasi perempuan Myanmar yang bernama *Karen Women's Organisation*. Kedua pihak tersebut membuktikan bahwa perempuan juga mampu menjadi seorang agen perubahan dalam sebuah konflik. Pihak-pihak tersebut melakukan aksinya dalam menciptakan perdamaian dengan berbagai caranya sendiri. Mulai dari melakukan kampanye lewat media sosial hingga memberikan surat terbuka kepada pihak-pihak yang memiliki kekuasaan di Myanmar.

Melihat dari usaha pihak-pihak tersebut sekaligus sebagai upaya mewujudkan cita-cita dari Resolusi Dewan Keamanan PBB 1325 mengenai keterlibatan perempuan dalam proses perdamaian di suatu wilayah. Dalam resolusi ini terdapat empat poin utama yaitu, Peningkatan keterwakilan perempuan dalam semua tingkat pengambilan keputusan serta partisipasi perempuan tersebut dalam pembangunan dan perdamaian serta pencegahan suatu konflik, Pengintegrasian perspektif gender dalam proses pascakonflik dan pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan perspektif gender dalam pembangunan perdamaian serta pencegahan terjadinya konflik, Melakukan perlindungan khusus perempuan terhadap tindakan kekerasan fisik maupun seksual dan Pengintegrasian perspektif gender dalam berbagai program, pelaporan serta laporan operasi perdamaian PBB.

Dalam upaya perwujudan resolusi tersebut, penulis melihat bahwa tidak akan terwujud suatu hal atau penyelesaian kasus apabila tidak memiliki kesempatan politik. Melalui kesempatan politik inilah perempuan bisa turut serta menjadi seorang agen perubahan, baik membawa nama individu atau dalam suatu organisasi non pemerintahan. Hal ini dapat penulis kaitkan dengan apa yang telah dilakukan oleh Wai Wai Nu dan *Karen Women's Organisation*. Melirik dari peran Wai Wai Nu sebagai agen perubahan dalam kasus Rohingya ini dikarenakan ia aktif dalam kegiatan politik, yang dimulai dengan ayahnya lalu berlanjut dengan dirinya sendiri yang ikut

serta terjun dalam dunia tersebut. Jalan Wai Wai Nu dalam melakukan usaha untuk menciptakan perdamaian pada kasus yang terjadi di Rohingya ini dibantu dengan adanya campur tangan politik di dalamnya.

Sedangkan, keterlibatan yang dilakukan oleh *Karen Women's Organisation* dapat dikaitkan dengan salah satu variabel yang berada di dalam teori *Political Opportunities Structure*, dimana keterlibatan berbagai gerakan sosial dapat terjadi apabila terbukanya tingkatan akses ke lembaga politik maupun pemerintahan. Dalam kasus ini, *Karen Women's Organisation* memiliki berbagai kedekatan dengan berbagai lembaga politik, baik itu lembaga yang berkaitan dengan Negara Myanmar maupun lembaga kenegaraan yang berada di luar Myanmar.

Selain itu, tingkat atau pencapaian dari usaha para perempuan dalam melakukan resolusi konflik Rohingya di Myanmar ini masih termasuk rendah. Hal ini dikarenakan pemerintah yang masih seolah menutup mata akan kasus tesebut, serta rendahnya tingkat edukasi para perempuan Rohingya dan terbatasnya akses dalam mengutarakan pendapatnya di muka publik bahkan di forum pemerintahan. Untuk itu, peranan perempuan dalam menjadi seorang agen perubahan ini selain didukung oleh kesempatan politik juga didukung oleh tingkat pendidikan yang ditempuhnya. Adanya pendidikan yang mumpuni mampu membuka kesempatan politik yang lebih besar bagi perempuan di Rohingya.